

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah telah mendapatkan kewenangan untuk membangun, atau mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini Pemerintah Daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat pendanaan dari dana desa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan di desa yang meliputi aspek kehidupan masyarakat (sosial dan ekonomi).

Pembangunan desa diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah desa untuk mengatur sendiri dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengembangan desa. Pengembangan perekonomian desa dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dengan membangun lingkungannya secara mandiri dan profesional dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah Desa memiliki suatu lembaga/badan perekonomian yang dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang sebagian besar dari kekayaan desa yang dapat dipisahkan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya BUMDes didukung oleh berbagai syarat misalnya modal penyerta yaitu modal dari masyarakat. Dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan

dapat memanfaatkan aset ekonomi yang ada di desa dengan menstimulasi BUMDes yang dikelola penuh oleh masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes memiliki banyak keuntungan bagi suatu desa yang meliputi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa), memajukan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama penanam saham pada BUMDes. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Dasar hukum pembentukan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010.

Dimana setiap desa hanya dapat memiliki satu unit BUMDes yang didirikan sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh suatu desa yang pembentukannya melalui musyawarah masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di setiap wilayah ataupun Desa tentu memiliki karakteristik potensi sumber daya masing-masing, hal tersebut menjadi faktor-faktor penghambat ataupun pendukung dari pengembangan BUMDes. Dalam mengembangkan usaha BUMDes memerlukan perencanaan bisnis sehingga dapat memperlancar peningkatan usaha. Dalam pengembangan BUMDes, pengelola harus dapat menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal sehingga dapat mengetahui aliran pendapatan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan (Yunita et al., 2019). BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa (Subaidi et al., 2019). BUM Desa didirikan untuk mendukung misi dari

pemerintah yaitu membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial di desa. Pada kenyataannya tidaklah mudah dalam mengembangkan BUM Desa di desa. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUM Desa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUM Desa (Rahmawati, 2020).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berupaya meningkatkan perekonomian desa dengan melalui pengelolaan BUMDes. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan monitoring BUMDes yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, Pemerintah Sidoarjo diharapkan mampu bertindak tegas memberikan sanksi administrasi bagi desa-desa yang belum memiliki atau mendirikan BUMDes. BUMDes Kabupaten Sidoarjo merupakan BUMDes yang memiliki transaksi tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Yetty Sri Indriastuti selaku Kepala Bidang PUEM Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, yang menyatakan bahwa :

“Transaksi tersebut hanya BUMDes di Sidoarjo yang telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentunya lebih banyak lagi hasil transaksinya”. Diakses pada tanggal 7/12/2021 (<https://www.harianbhirawa.co.id/bumdes-kabupaten-sidoarjo-transaksi-tertinggi-di-jawa-timur-capai-rp19-m/>)

Tabel 1.1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah		
		Desa	Kelurahan	BUMDes
1	Sidoarjo	10	14	5
2	Buduran	15	-	14
3	Candi	24	-	11
4	Porong	13	6	4
5	Krembung	19	-	15
6	Tulangan	22	-	13
7	Tanggulangin	19	-	9
8	Jabon	15	-	10
9	Krian	19	3	19

No	Kecamatan	Jumlah		
		Desa	Kelurahan	BUMDes
10	Balongbendo	20	-	18
11	Wonoayu	23	-	13
12	Tarik	20	-	10
13	Prambon	20	-	13
14	Taman	16	8	7
15	Waru	17	-	12
16	Gedangan	15	-	-
17	Sedati	16	-	1
18	Sukodono	19	-	9
Jumlah		322	31	183

Sumber : Dokumen Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, September 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Jumlah BUMDes yang terdaftar sejumlah 183 sedangkan untuk Desa yang ada dikabupaten Sidoarjo sejumlah 322. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa yang ada di Kecamatan Krian semua sudah memiliki BUMDes dengan jumlah 19 BUMDes dari 19 Desa. Sedangkan untuk Desa yang belum memiliki BUMDes sama sekali berdasarkan data di atas yaitu Kecamatan Gedangan.

Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki tiga kategori yaitu BUMDes tergolong maju, berkembang dan pemula. Dalam kategori maju dimana apabila sebuah BUMDes sudah memiliki kelayakan usaha, perdes, penyertaan modal dan memberikan kontribusi pendapatan asli ke desa. Sedangkan untuk kategori berkembang dimana BUMDes tersebut belum bisa memberikan kontribusi pada desanya. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa melalui unit-unit usaha dan potensi produktif ekonomi masyarakat.

Tabel 1.2 Jumlah BUMDes Berdasarkan Kategorinya di Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Agustus 2021

Klasifikasi BUMDes	Jumlah BUMDes
Maju	37
Berkembang	48
Pemula	118

Sumber: Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah BUMDes berdasarkan kategorinya di Kabupaten Sidoarjo pada Bulan Agustus 2021 yaitu jumlah BUMDes kategori maju berjumlah 37 BUMDes, dimana salah satunya yaitu BUMDes Kebaron Mandiri Makmur yang berada di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Pendirian BUMDes Mandiri Makmur berdiri pada tahun 2017 dengan berdasarkan Peraturan Desa No. 6 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.3 Data Umum BUMDes Mandiri Makmur Desa Kebaron

DATA UMUM BUMDESA : BUMDES-KEBARON MANDIRI MAKMUR	
Kabupaten	Sidoarjo
Kecamatan	Tulangan
Desa	Kebaron
Nama BUMDesa	Kebaron Mandiri Makmur
Tahun Berdiri	2017
Alamat	Jl. Raya Kebaron no.1 (Area Balai Desa Kebaron)
Alamat Website	-
Peraturan Desa Tentang Pendirian BUMDesa Nomor	Perdes Nomor 6 Tahun 2017
SK Kepala Desa tentang Pengurus/Pengelola BUMDes Nomor	220/33/404.8.13.17/2017
Nilai Akhir	81.25
Klasifikasi BUMDes	MAJU
Tanggal Buat	12-02-2019
Tanggal Ubah	07-03-2021

Sumber : Aplikasi Data Center Provinsi Jawa Timur (2021)

Berdasarkan gambar di atas, BUMDes Kebaron Mandiri makmur merupakan BUMDes yang termasuk dalam kategori maju, dimana dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Kebaron. Pendapatan yang diperoleh oleh BUMDes Kebaron Mandiri Makmur dari tahun 2018- per 30 November 2021 tidak signifikan. Dimana dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Pendapatan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur 2018-Per 30 November 2021

Tahun	Pendapatan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur
2018	-
2019	-
2020	Rp30.150.000,00
2021	Rp93.529.400,00

Sumber: BUMDes Kebaron Mandiri Makmur 2021

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur pada tahun 2018-2019 belum memiliki ada pemasukan pendapatan. Hal tersebut disebabkan karena pada 2 tahun tersebut BUMDes Mandiri Makmur masih dalam pengurusan administrasi, Ad/Art dan lain-lain. Selain itu juga masih dalam peralihan kepengurusan wisata kebun petik jambu. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan BUMDes Mandiri Makmur sebesar Rp30.150.000,00, pada per 30 November 2021 pendapatan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur berjumlah Rp93.529.400,00.

Tabel 1.5 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Usaha
1.	Wisata Kebun Petik Jambu
2.	TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)
3.	PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Sumber: Dokumen BUMDes Desa Kebaron 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes Kebaron Mandiri makmur memiliki 3 unit usaha meliputi Wisata kebun petik jambu, TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Pertama yaitu Unit Usaha Wisata kebun petik jambu ini dikelola oleh POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Kebaron . Wisata kebun petik jambu ini seluas 4 Hektar dan untuk biaya masuk sebesar Rp5.000,00 sedangkan harga jambu 1 kg Rp8.000,00. Yang kedua yaitu unit usaha TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) yang dikelola oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Kebaron. Ketiga yaitu unit usaha PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah salah satu program yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. PANSIMAS Desa Kebaron dikelola oleh KP-SPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi) Desa Kebaron. Dari setiap unit usaha BUMDes Kebaron Mandiri Makmur memiliki pengolah pengurus BUMDes masing-masing dari setiap unit usaha. Dari beberapa unit usaha tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen BUMDes.

Pertama yaitu perencanaan sebagai tahap awal atau mendasar proses manajemen pada suatu organisasi. Dalam siklus manajemen tersebut, perencanaan sebagai fungsi yang penting dalam keberlanjutan siklus manajemen. Hal ini dilatarbelakangi sejumlah tantangan dalam manajemen organisasi untuk mewujudkan BUMDes. BUMDes Kebaron Mandiri makmur masih terdapat berbagai hambatan dalam manajemen BUMDes yang meliputi terkait

pengembangan BUMDes, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam pengembangan BUMDes Mandiri Makmur masih terbilang lambat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang profesional yang terlibat dalam usaha tersebut sehingga tidak dapat menjalankan dalam kegiatan pengelolaan BUMDes, oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini karyawan atau pegawai pengelola BUMDes Kebaron Mandiri Makmur harus dikelola dengan baik. Selain itu juga kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pemasaran usaha. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan penghasilan pada BUMDes Kebaron Mandiri Makmur.

Tabel 1.6 Jumlah Pengolah BUMDes Kebaron Mandiri Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Aktif	Tidak aktif	Jumlah Pengolah BUMDes Kebaron Mandiri Makmur
1.	SD	-	-	0
2.	SMP	1	1	2
3.	SMA	5	10	15
4.	Akademi D1-D3	-	1	1
5.	Sarjana S1/S3	1	-	1
Jumlah		7	12	19

Sumber : Dokumen BUMDes Desa Kebaron, Oktober 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah pengolah BUMDes Kebaron Mandiri Makmur berjumlah 19 Orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengolah BUMDes Kebaron Mandiri Makmur yang aktif terdiri dari 7 Orang sedangkan pengolah yang tidak aktif dalam BUMDes Kebaron Mandiri Makmur terdiri dari 12 Orang. Dengan minimnya jumlah pengolah yang aktif dalam pengolahan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur dapat mempengaruhi pengembangan BUMDes.

Kedua yaitu Pengorganisasian, dalam pengelolaan organisasi BUMDes Kebaron Mandiri Makmur terpisah dari organisasi Pemerintah Desa Kebaron dan dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa. Pengelolaan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur harus dilakukan oleh pengurus tersendiri. Adapun susunan pengurus BUMDes Kebaron Mandiri Makmur yang terdiri dari Penasehat, Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Ketua Unit Pengolah Usaha.

Ketiga yaitu Kepemimpinan, BUMDes Kebaron Mandiri Makmur terdapat suatu keberhasilan dalam kinerja para karyawan yang menjadikan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur termasuk pada kategori BUMDes maju yang didukung oleh gaya kepemimpinan yang dapat memberikan pengaruh pada bawahannya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Namun dalam pengelolaan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur memiliki beberapa hambatan meliputi minimnya sumber daya manusia. Dengan melihat hal ini, juga bisa disebabkan karena gaya kepemimpinan yang masih belum mampu meningkatkan motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kurangnya peranan kepemimpinan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur dalam menciptakan komunikasi yang harmonis serta memberikan pembinaan karyawan, akan menyebabkan tingkat kinerja karyawan rendah.

Tabel 1.7 Data Penilaian Kinerja Karyawan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur Tahun 2018-2021

Tahun	Kategori Kinerja Karyawan			
	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
2018	14 Karyawan	5 Karyawan	-	-
2019	15 Karyawan	4 Karyawan	-	-
2020	7 Karyawan	6 Karyawan	1 Karyawan	5 Karyawan
2021	3 Karyawan	4 Karyawan	-	12 Karyawan

Sumber : BUMDes Kebaron Mandiri Makmur 2021

Berdasarkan data di atas, kinerja karyawan yang dapat dikatakan sangat baik yaitu pada tahun 2018 yang terdiri dari 14 karyawan dalam kategori sangat baik dan 5 karyawan cukup baik. Pada tahun 2019, terdapat 15 karyawan sangat baik, 4 karyawan baik. Pada tahun 2020, terdapat 7 karyawan sangat baik, 6 karyawan baik, 1 karyawan cukup baik, 5 karyawan kurang baik. Penurunan kinerja karyawan kembali terjadi pada tahun 2021 dimana terdapat 3 karyawan sangat baik, 4 karyawan baik, dan 12 kurang baik. Penurunan kinerja karyawan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur dimulai pada tahun 2020-2021. Dengan ini, gaya kepemimpinan yang dimiliki pada BUMDes Kebaron Mandiri Makmur memiliki pengaruh pada kinerja karyawan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur.

Keempat yaitu pengendalian upaya, untuk mengatasi beberapa hambatan dalam pengelolaan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur memerlukan cara untuk menangani permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, Direktur BUMDes Kebaron Mandiri Makmur harus memastikan bahwa tindakan para anggota BUMDes benar-benar melakukan pengembangan BUMDes ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya fungsi pengendalian, Direktur BUMDes Kebaron Mandiri Makmur harus dapat menjaga organisasi dengan baik dan tidak membiarkannya penyimpangan tersebut terlalu jauh dari tujuan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur.

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun BUMDes Kebaron Mandiri Makmur termasuk kategori BUMDes maju akan tetapi dapat dilihat dari usaha yang dijalankan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur memiliki terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Selain alasan di atas, peneliti juga

tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan di dukung beberapa literature terdahulu seperti Moh Subaidi, Slamet Muchsin, dkk dalam penelitiannya yang berjudul tentang “Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen BUMDes masih kurang berjalan dengan baik mengingat SDM yang masih kurang dalam pengelolaan BUMDes (Subaidi et al., 2019). Manajemen dalam pengelolaan BUMDes itu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya manajemen yang baik maka tidak akan berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang belum maksimal. Maka penelitian diharapkan dapat membantu pengolahan pengembangan BUMDes Mandiri Makmur terutama dalam hal manajemen. Dengan ini dapat mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Desa untuk mengatur pengelolaan BUMDes Kebaron Mandiri Makmur dengan menerapkan teori manajemen. Menurut Stonner, (2006) manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya. Proses manajemen tersebut dilakukan mulai dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Batlejery, 2016). Selain itu juga, Dalam penelitian Hanifah, (2011) menggunakan model penelitian yang sama dengan karakter temuan yang khas yaitu ditemukannya pola kepemimpinan. Dalam

sebuah manajemen pola kepemimpinan berpengaruh karena dapat mendukung atau mengarahkan upaya atau cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Sebuah Manajemen dalam pengelolaan BUMDes ini sangat penting karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan BUMDes serta dapat menangani beberapa permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) KEBARON MANDIRI MAKMUR DESA KEBARON KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah dan latar belakang maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan literature bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta untuk menambah bacaan ilmiah di perpustakaan khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. Untuk menambah wawasan tentang pengelolaan BUMDes secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Kantor Desa Kebaron

Penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah desa mengenai manajemen Badan Usaha Milik Desa wisata (BUMDes) Kebaron Mandiri Makmur Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan evaluasi dalam pengembangan BUMDes guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

c. Bagi Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini digunakan sebagai bahan literatur kepustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.